BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan spirituil berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak, karena pajak merupakan pendapatan yang besar di dalam suatu negara. dengan berkembangnya suatu negara semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. disamping meningkatnya taraf hidup masyarakat semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak.

Maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan

dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil, dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegitan operasional di daerahnya. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Potensi karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah amat ditentukan atas factor keuangan ini. Sentral karena bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efisien dan efektif tanpa tersedianya dana yang memadai.

Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, maka dari itu daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan dalam pemerintah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah. karena pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dan salah satu pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah. Karena di sektor pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah.

Pada daerah Provinsi wilayah Cimahi pajak kendaraan bermotor juga merupakan pendapatan yang paling besar dan memberikan kontribusi yang besar dalam

perkembangan daerah. Dari pajak kendaraan bermotor pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah melalui Kantor Unit Pelayanan Pedapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Kantor Unit Pelayanan Pedapatan Daerah tersebut bertugas sebagai Pengelola dan Pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Daerah serta penyelenggara pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah.

Menurut Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, pendapatan yang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak kendaraan bermotor, dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli daerah yang dapat memberikan kemajuan daerah kota Cimahi baik dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .

Dan kinerja dalam UPPD khususnya para staf dan pegawai pada Unit Pelayanan Pajak Daerah sangatlah penting guna menjalankan dalam pengelolaan pajak atau pendapatan daerah. maka dari itu kinerja dalam kantor UPPD baik dari strategi atau pelayanan harus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran pajak. Dari kinerja UPPD tersebut Untuk meningkatkan pendapatan dalam pajak kendaraan bermotor Di antaranya dengan membenahi ruang pelayanan untuk wajib pajak. Selain ruang full AC dan bebas rokok, interior ruang pelayanan ditata seperti sebuah bank. Beberapa kursi busa disusun dengan rapi untuk kenyamanan wajib pajak. Dan dari situlah kinerja

Pimpinan dan Staf karyawan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dalam meningkatakan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah tanggapan Karyawan atau Staf berdasakan hasil wawancara mengenai Kinerja pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.1
Analisis Kinerja UPPD Provinsi XXXI Cimahi Dalam meningkatkan Pendapatan pajak Kendaraan bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi

No.	Aktifitas kinerja staf UPPD	%	Keterangan
1.	Tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja.	85 %	Sebagian besar merasa puas atas kinerja dalam organisasi.
2.	Tingkat penerapan kedisiplinan	75 %	Karyawan menganggap bahwa tingkat penerapan peraturan dalam kinerja dirasa cukup baik, namun masih ada yang melanggar.
3.	Tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja	75 %	Sebagian besar merasa puas karena hubungan baik dapat terjalin antar karyawan.
4.	Tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas.	65 %	Reaksi karyawan cukup baik dalam menjalankan misi atau tugas organisasi, namun ditemukan masih ada target yang belum bisa dicapai.

Sumber : karyawan atau staf kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa kinerja karyawan pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi adalah baik, sehingga penulis dapat disimpulkan kinerja Staf dan Karyawan pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat

baik dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini dilihat dari kemampuan Kinerja organisasi dalam mengatur setiap tugasnya.

1. Berdasarkan tabel 1 mengenai Aktifitas kinerja staf atau karyawan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi berdasarkan tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja sebagian besar merasa puas atas kinerja dalam organisasi. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja staf atau karyawan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi mengenai inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja sangatlah baik.
2. Berdasarkan tingkat kedisiplinan dari tabel 1 Karyawan menganggap bahwa tingkat penerapan peraturan dalam kinerja dirasa cukup baik, namun masih ada yang melanggar, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kedisiplinan karyawan kurang baik masih perlu peningkatan kedisiplinan dalam bekerja.
3. Berdasarkan tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja Sebagian besar merasa puas karena hubungan baik dapat terjalin antar karyawan, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja sangatlahlah baik dilihat dari kerjasama yang baik antara karyawan.
4. Berdasarkan tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas Reaksi karyawan cukup baik dalam menjalankan misi atau tugas organisasi, namun ditemukan masih ada target yang belum bisa dicapai, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi/reaksi terhadap tugas cukup baik tapi masih kurang sehingga masih ada target yang belum bisa dicapai.

Berikut ini adalah tanggapan Masyarakat atau Wajib Pajak berdasakan hasil wawancara mengenai Kinerja pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Pendapat masyarakat Tentang kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi

No.	Pendapat Masyarakat/wajib Pajak Tentang kinerja UPPD XXXI Cimahi	%	Keterangan
1.	**Pelayanan** Tingkat Pelayanan dan Kenyaman dalam Pembayaran pajak Kendaraan bermotor.	85 %	Hal ini bisa dilihat dari hasil Kinerja dan Pelayanan.
2.	**Sosialisasi** Pemberian Informasi Pada wajib pajak mengenai pembayaran pajak.	60 %	Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam Pembayaran pajak.
3.	**Pengetahuan kerja** Mampu dan mengetahui dalam penggunaan alat – alat kerja	70%	Sebagian besar dapat menggunakan walaupun masih memerlukan bantuan orang lain.
4.	**Kedisiplinan** Ketepatan karyawan dalam menjalankan Pekerjaanya.	60 %	Kurangya ketepatan Karyawan atau staf dalam bekerja.
5.	**Kehadiran** Kedisiplinan dalam kehadiran maupun terhadap waktu	60 %	Sebagian karyawan masih menganggap kurang karena masih banyaknya pelanggaran dalam waktu kerja.
6.	**Kerjasama** Kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja	80 %	Kerja sama antar karyawan atau staf sangat Kompak dalam menjalankan tugasnya.

Sumber : Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD XXXI Cimahi

Berdasarkan tabel 2 dan pengamatan penulis, fenomena yang terjadi di lapangan kenyataannya pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi belum mencapai hasil yang maksimal dibuktikan dengan tabel 2 dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mau dalam partisipasi pembayaran pajak kendaraan bermotor , hal tersebut terjadi dan disebabkan karena :

Kurangnya Informasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan kurangnya optimal dalam Pendapatan pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Cimahi. **(Sumber : Esti Buana, Sub Bagian Tata Usaha UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi).**

Mengingat setiap perusahaan/instansi memiliki kinerja yang merupakan peranan penting dalam menjalankan operasional perusahaan atau Instansi, kinerja karyawan atau staf juga harus segera ditangani pimpinan karena menyangkut citra kantor UPPD di mata masyarakat. Dan Sistem informasi dalam Organisasi Perusahaan atau Instansi sangatlah penting. Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe davis, Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Maka dari itu sistem informasi sangat penting pada kantor UPPD Propinsi Wilayah XXXI Cimahi Untung memberikan Informasi yang jelas bagi masyarakat untuk mempermudah dalam pembayaran pajak. (**Kristianti ST. 2006. Diklat Kuliah Perancangan Sistem Informasi).**

Berdasarkan fenomena di atas, serta mengingat pentingnya Kinerja dalam Instansi yang merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatakan pendapatan pajak kendaraan bermotor , maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai :

"**Analisis Kinerja UPPD Wilayah XXXI Cimahi Dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Cimahi".**

1.2 Identifikasi dan Rumusam Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka dapat di Identifikasikan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Kurangnya optimal dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Pada kantor UPPD XXXI Cimahi.
2. Bagaimana hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagaimana Strategi Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna diolah, dianalisis, tentang Kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mengetahui Kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
2. Mengetahui hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

3. Mengetahui Strategi Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD XXXI Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik.

   Hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi ilmu Akuntansi Sektor Publik dalam bidang ilmu peningkatan pendapatan, terutama mengenai Kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dilakukan kajian lebih dalam mengenai variabel penelitian yang sama.

3. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai kinerja dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah serta sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat dalam bangku kuliah dengan pelaksanaan dilapangan.

4. Bagi program studi yang bersangkutan

   Manfaat bagi program studi yaitu dapat menjadikan pertimbangan atau penilaian apakah mahasiswa sudah menguasai teori dalam kuliah dan mampu untuk diterapkan dalam dunia kerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Bagi Pimpinan UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi Inspirasi pemikiran kepada UPPD XXXI Cimahi dalam pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan dengan memperhitungkan kualitas dan kesuksesan dalam kinerja.

2. Bagi karyawan

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan atau pengetahuan tentang pentingnya kinerja dalam meningkatkan suatu pendapatan dan memberikan motifasi bagi karyawan atau staf untuk lebih meningkatkan cara pemikirannya dalam bekerja.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yang berlokasi di Jl. Raya Cibabat No.331A Cimahi.

1.5.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2010.

Tabel 1.3

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Maret 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Proposal																				
2	Pelaksanaan Penelitian																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan dan Analisis data																				
5	Penyusunan Laporan																				